

4. Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan selanjutnya disebut Ujian S/M/PK adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh sekolah/madrasah/penyelenggara program pendidikan kesetaraan untuk semua mata pelajaran.
5. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu.
6. Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan adalah kegiatan pengukuran dan penilaian penyetaraan pencapaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional pada Program Paket B/Wustha setara SMP/MTs dan Program Paket C setara SMA/MA/SMAK/SMK.
7. Ujian kompetensi keahlian adalah ujian nasional yang terdiri atas ujian teori dan ujian praktik kejuruan.
8. Nilai Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan selanjutnya disebut Nilai S/M/PK adalah nilai gabungan antara Nilai Ujian S/M/PK dan rata-rata nilai rapor atau rata-rata nilai derajat kompetensi (NDK).
9. Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya disebut Nilai UN adalah nilai yang diperoleh peserta didik dari UN.
10. Kriteria kelulusan adalah persyaratan pencapaian minimal Standar Kompetensi Lulusan dari semua mata pelajaran untuk dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
11. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BSNP adalah badan mandiri dan profesional yang bertugas untuk menyelenggarakan UN.

12. Program Wustha adalah pendidikan dasar tiga tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah setingkat Program Paket B dengan kekhasan pendalaman pendidikan agama Islam.
13. Kisi-kisi UN adalah acuan dalam pengembangan dan perakitan soal UN yang disusun berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dalam Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
14. Paket naskah soal UN adalah variasi perangkat tes yang paralel, terdiri atas sejumlah butir soal yang dirakit sesuai dengan kisi-kisi UN.
15. Dokumen UN adalah bahan UN yang bersifat rahasia, terdiri atas naskah soal, *Compact Disk Listening Comprehension*, lembar jawaban yang sudah diisi, daftar hadir, dan berita acara.
16. Dokumen pendukung UN adalah seluruh bahan UN yang tidak bersifat rahasia, terdiri atas blanko daftar hadir, blanko lembar jawaban, blanko berita acara, tata tertib, pakta integritas, amplop naskah dan amplop lembar jawaban.
17. Lembar Jawaban Ujian Nasional yang selanjutnya disebut LJUN adalah lembaran kertas yang digunakan oleh peserta didik untuk menjawab soal UN.
18. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SHUN adalah surat keterangan yang berisi Nilai UN serta tingkat capaian kompetensi lulusan.
19. Prosedur Operasi Standar yang selanjutnya disebut POS adalah urutan langkah baku yang mengatur teknis pelaksanaan UN dan Ujian S/M/PK yang ditetapkan oleh BSNP.

- ## Pasal 4

- [illegible]

2. Kriteria kelulusan peserta didik dari Ujian PK untuk semua mata pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi berdasarkan perolehan Nilai PK dari PKBM/keompok belajar pada SKB.
3. Kriteria kelulusan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup minimal rata-rata nilai dan minimal nilai setiap mata pelajaran yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.
4. Nilai S/M/PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diperoleh dari gabungan:
 - a. Rata-rata nilai rapor dengan bobot 50% (lima puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen):
 1. semester I sampai dengan semester V atau yang setara pada SMP/MTs, SMPLB, dan Paket B/Wustha;
 2. semester III sampai dengan semester V atau yang setara pada SMA/MA/MAK/SMTK, SMALB, SMK/MAK, dan Paket C;
 3. semester I sampai dengan semester V atau yang setara bagi SMP/MTs dan SMA/MA/MAK/SMTK yang menerapkan sistem SKS.
 - b. Nilai Ujian S/M/PK dengan bobot 30% sampai dengan 50% (lima puluh persen).
5. Total bobot nilai rapor dan nilai Ujian S/M/PK 100% (seratus persen).
6. Nilai S/M/PK dilaporkan dalam rentang nilai 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).

Pasal 5

Kelulusan peserta didik dari:

- a. SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA/SMK/SMK, SMALB, SMK/MAK ditetapkan oleh setiap satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rapat dewan guru.
- b. Program Paket B/Wustha dan Program Paket C ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui rapat pleno dengan melibatkan perwakilan dari satuan pendidikan nonformal.

Pasal 6

5. Setiap peserta didik yang telah mengikuti UN akan mendapatkan SHUN.
6. SHUN sekurang-kurangnya berisi:
 - a. biodata siswa,
 - b. nilai hasil UN untuk setiap mata pelajaran yang diujikan, dan
 - c. tingkat pencapaian kompetensi lulusan untuk setiap mata pelajaran yang diujikan.
7. Nilai hasil UN dilaporkan dalam rentang nilai 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).
8. Tingkat pencapaian kompetensi lulusan seperti yang dimaksud pada ayat (1) disusun dalam kategori sebagai berikut.
 - a. sangat baik, jika nilai lebih dari 85 (delapan puluh lima) dan kurang dari atau sama dengan 100 (seratus);
 - b. baik, jika nilai lebih dari 70 (tujuh puluh) dan kurang dari atau sama dengan 85 (delapan puluh lima);

- 3. Persyaratan peserta didik mengikuti ujian nasional dan ujian sekolah/madrasah/pendidikan kesetaraan**

Pasal 7

- [illegible]

4. Hak dan kewajiban peserta didik dalam ujian nasional dan ujian sekolah/madrasah/pendidikan kesetaraan

dalam Pasal 7 dan Pasal 8 berhak mengikuti Ujian S/M/PK, dan UN.

1. Peserta didik yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 berhak mengikuti Ujian S/M/PK, dan UN.
2. Peserta didik berkebutuhan khusus meliputi tunanetra, tunarungu, tunadaksa ringan, dan tunalaras yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 berhak mengikuti Ujian S/M/PK, dan UN.
3. Peserta didik yang karena alasan tertentu dengan disertai bukti yang sah berhalangan mengikuti UN Utama dapat mengikuti UN Susulan sesuai jadwal yang diatur dalam POS UN yang ditetapkan oleh BSNP.
4. Peserta UN jenjang SMA/MA/SMK/SMK, SMK/MAK, dan Program Paket C yang mencapai kompetensi lulusan dengan kategori kurang pada suatu mata pelajaran dapat mengikuti UN perbaikan.

- ## 5. Pelaksanaan ujian sekolah/madrasah/pendidikan kesetaraan

Satuan pendidikan melaksanakan Ujian S/M/PK untuk semua mata pelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Ujian S/M/PK dilaksanakan oleh satuan pendidikan sesuai dengan POS Ujian S/M/PK.

Ujian S/M/PK dilaksanakan sebelum pelaksanaan UN sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

1. Nilai S/M/PK untuk SMP/MTs/SMPLB, Program Paket B/Wustha, SMA/MA/MAK/SMTK, SMALB, SMK/MAK, dan Program Paket C diterima oleh Panitia UN Tingkat Pusat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan UN.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyerahan dan penerimaan Nilai S/M/PK beserta pembobotannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam POS UN yang ditetapkan oleh BSNP.

Pasal 14

1. BSNP menyelenggarakan UN bekerja sama dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan satuan pendidikan.
2. BSNP sebagai Penyelenggara UN bertugas:
 - a. menelaah dan menetapkan kisi-kisi UN;
 - b. menyusun dan menetapkan POS pelaksanaan UN;
 - c. menelaah dan menetapkan naskah soal UN;
 - d. memberikan rekomendasi kepada Menteri tentang pembentukan Panitia UN Tingkat Pusat;
 - e. melakukan koordinasi persiapan dan pengawasan pelaksanaan UN secara nasional; dan
 - f. melakukan evaluasi dan menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan UN.
3. Panitia UN tingkat Pusat ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
4. Panitia UN tingkat Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan bertanggung jawab kepada Panitia UN tingkat Pusat.
5. Panitia UN tingkat Provinsi terdiri atas dinas pendidikan provinsi, kantor wilayah kementerian agama provinsi, perguruan tinggi, dan lembaga penjaminan mutu pendidikan.

- ## Pasal 15

- [illegible]

- ## Pasal 16

Pasal 17

- [illegible]

- ## Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

- [illegible]

- 7. Bahan ujian sekolah/madrasah/pendidikan kesetaraan dan Ujian nasional**

1. Kisi-kisi Ujian S/M disusun berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi
2. Dasar dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan. Kisi-kisi Ujian PK disusun berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang ditetapkan oleh BSNP.
3. Kisi-kisi UN disusun berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar.
4. Kisi-kisi UN untuk muatan keagamaan berdasarkan kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.
5. Kisi-kisi UN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menggunakan kisi-kisi UN sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan BSNP.

1. Satuan pendidikan menyusun naskah soal Ujian S/M/PK berdasarkan kisi-kisi Ujian S/M/PK.
2. Panitia UN Tingkat Pusat menyusun naskah soal UN berdasarkan kisi-kisi UN.

- ## Pasal 24

- [illegible]

Pasal 25

Pasal 25

- ## Pasal 26

Pasal 26

9. Sanksi

9. Sanksi

Pasal 27

Pasal 27

- ## 10. Pengertian ujian nasional menurut para ahli

10. Pengertian ujian nasional menurut para ahli

[illegible]

11. Perkembangan Ujian Nasional

a. Periode 1950 - 1960

⁸ Syawal Gultom. *Ujian Nasional sebagai Wahana Evaluasi Pengembangan Pendidikan Karakter Bangsa*. Jurnal. h. 5

¹⁰ H. A. R. Tilaar. *Standarisasi Pendidikan Nasional: Suatu Tinjauan Kritis*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 109-110.

¹¹ Arya, dkk, Loc.Cit., hal 10-12.

b. Periode 1965 - 1971

c. Periode 1972 – 1979

d. Periode 1980 – 2001

e. Periode 2002-2004

Ada beberapa perubahan fundamental UN 2009 untuk tingkat SMP hingga

[illegible]

12. Tujuan Ujian Nasional

Ada tiga tujuan pokok penyelenggaraan ujian nasional, yaitu¹² :

- a. Untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik
- b. Untuk mengukur tingkat pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota , dan sekolah
- c. Untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pendidikan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan sekolah kepada masyarakat.

13. Fungsi Ujian Nasional

SK.No.047/U/2002 nomor 3 yang dikeluarkan oleh Mendiknas, berisi tentang fungsi ujian nasional, diantaranya yaitu¹³ :

- a. Alat pengendali mutu pendidikan secara nasional.

Melalui penyelenggaraan UN diharapkan mutu pendidikan nasional dapat dikendalikan. UN tidak dapat digunakan untuk pengelompokan sekolah bermutu dan sekolah yang kurang bermutu, karena akan semakin memperlebar jurang pemisah mutu sekolah yang secara nasional memang rentang variasi mutu sekolah ini sudah sangat panjang.

- b. Mendorong peningkatan mutu pendidikan.

Penyelenggaraan UN diharapkan dapat memotivasi sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan berusaha untuk mencapai hasil UN secara optimal.

¹² Zainal Arifin, *Evaluasi Pembelajaran* (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2011), h. 61.

¹³Ibid halaman, h. 62.

- d. Pertimbangan dalam seleksi penerimaan siswa baru pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Butir – butir soal ujian nasional sudah disusun untuk mampu membedakan antara peserta didik yang telah memenuhi standar kompetensi dengan peserta didik yang belum menguasai standar kompetensi. Dengan demikian, akan sangat tepat bila digunakan juga untuk mengetahui potensi calon peserta didik untuk mengikuti pembelajaran di sekolah yang dipilihnya.

Gambaran mengenai pendidikan tinggi, pendidikan menengah maupun pendidikan dasar pada tataran internasional menunjukkan rendahnya mutu pendidikan di Indonesia dewasa ini. Oleh sebab itu pemerintah berupaya untuk menaikkan mutu pendidikan nasional antara lain dengan mengadakan ujian nasional.¹⁴

¹⁴ H.A.R.Tilaar , Op.Cit., h. 78.

Profil pendidikan di Indonesia sangat kompleks. Berbeda dengan pendidikan di negara lain yang kurang lebih homogen, profil pendidikan di Indonesia menunjukkan suatu profil yang beragam oleh karena perbedaan yang mencolok antar daerah, khususnya perbedaan antara pulau jawa dan pulau lainnya. Perbedaan lain adalah perbedaan antara kota dan desa, serta perbedaan antara daerah maju dan terpencil, oleh karena itu standar pendidikan adalah suatu niscaya.¹⁶

Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.¹⁸

¹⁸ Ibid.

Standar Nasional Pendidikan yang diberlakukan di Indonesia adalah ujian nasional. Ujian nasional merupakan sarana kontrol standarisasi nasional pendidikan. Ujian nasional ini bertujuan untuk memberikan gambaran peta permasalahan pendidikan secara nasional. Tidak heran jika yang dipilih hanyalah beberapa mata pelajaran yang bersifat essensial.¹⁹

b. Aspek psikologis

Faktor eksternal adalah kondisi lingkungan di sekitar siswa. Faktor eksternal tersebut meliputi²³ :

Lingkungan sekolah seperti para guru, tenaga kependidikan dan teman – teman sekelas dapat mempengaruhi semangat belajar siswa. Selain itu, lingkungan sosial yang lebih banyak mempengaruhi kegiatan belajar ialah orangtua dan keluarga siswa itu sendiri.

Faktor – faktor yang termasuk lingkungan non social adalah gedung sekolah dan letaknya, rumah tempat tinggal keluarga siswa dan letaknya, alat – alat belajar , keadaan cuaca dan waktu belajar yang digunakan siswa. Faktor – faktor ini dipandang turut menentukan keberhasilan belajar siswa.

[illegible]

1. Pengertian Motivasi Belajar

Menurut Mc. Donal, motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang di tandai dengan munculnya “feeling” dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Dari pengetahuan yang dikemukakan Mc. Donald ini mengandung tiga elemen penting.

- ²⁴ Sardiman, *Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar*, (Jakarta: Rajawali Pers 2014), h. 73

Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi lingkungannya.²⁵

2. Fungsi Motivasi

1. Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi.
2. Menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai.

[illegible]

- ### 3. Macam-macam Motivasi

- Motif-motif bawaan.

- Motif-motif yang dipelajari.

²⁶ Nasution, *Didakti Asas-asas Mengajar* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 76

2. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik

Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau fungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Sebagai contoh seseorang yang senang membaca, tidak usah ada yang menyuruhnya atau mendorongnya, ia sudah rajin membaca buku-buku untuk dibacanya.²⁷

²⁷ Sadirman, *Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 86-9]

- Motivasi ekstrinsik

²⁸ Ibid.,.

²⁹ Ibid.,.

³⁰ Ibid.,

Kebanyakan pendidik menginginkan kelas yang penuh dengan peserta didik yang mempunyai motivasi intrinsik. Tapi kenyataannya tidak demikian. Karena itu, pendidik harus menghadapi tantangan untuk membangkitkan motivasi peserta didik, membangkitkan minatnya, menarik dan mempertahankan perhatiannya, mengusahakan agar peserta didik mau mempelajari materi-materi yang diharapkan untuk dipelajari.

Dalam kaitannya itu perlu diketahui bahwa pendidik dapat menggunakan bermacam-macam motivasi agar peserta didik giat belajar. Ada beberapa bentuk dan cara untuk menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar di sekolah, antara lain :

Angka dalam hal ini sebagai simbol dari nilai kegiatan belajarnya. Banyak peserta didik belajar, yang utama justru untuk menucapai angka/nilai yang baik. Sehingga peserta didik biasanya yang dikejar adalah nilai ulangan atau nilai-nilai pada rapot angkanya baik.

[illegible]

4. Ego-involment

Menumbuhkan kesadaran kepada peserta didik agar merasakan pentingnya tugas dan menerimanya sebagai tantangan sehingga bekerja keras dengan mempertaruhkan harga diri, adalah sebagai salah satu bentuk motivasi yang cukup penting. Seseorang akan berusaha dengan segenap tenaga untuk mencapai prestasi yang baik dengan menjaga harga dirinya.

Para peserta didik akan menjadi giat belajar kalau mengetahui akan ada ulangan. Oleh karena itu, memberi ulangan ini juga merupakan sarana motivasi. Tetapi yang harus diingat oleh pendidik, adalah jangan terlalu sering (misalnya setiap hari) karena bisa membosankan dan bersifat rutinitas.

Dengan mengetahui hasil pekerjaan, apalagi kalau terjadi kemajuan, akan mendorong siswa untuk lebih giat belajar. Semakin mengetahui bahwa grafik hasil belajar meningkat, maka ada motivasi pada diri peserta didik untuk terus belajar, dengan suatu harapan hasilnya terus meningkat.

8. Hukuman

Hukuman sebagai *reinforcement* yang negatif tetapi kalau diberi secara tepat dan bijak bisa menjadi alat motivasi. Oleh karena itu pendidik harus memahami prinsip-prinsip pemberian hukuman.

Hasrat untuk belajar, berarti ada unsur kesengajaan, ada maksud untuk belajar. Hal ini akan lebih baik, bila dibandingkan segala sesuatu kegiatan yang tanpa maksud.

Hasrat untuk belajar berarti pada diri peserta didik itu memang ada motivasi untuk belajar, sehingga sudah barang tentu hasilnya akan lebih baik.

Motivasi muncul karena kebutuhan, begitu juga minat sehingga tepatlah kalau minat merupakan alat motivasi yang pokok. Proses belajar itu akan berjalan lancar kalau disertai dengan minat.

Tujuan yang diakui dan diterima baik oleh peserta didik, akan merupakan alat motivasi yang sangat penting. Sebab dengan memahami tujuan yang harus dicapai, karena dirasa sangat berguna dan menguntungkan, maka akan timbul gairah untuk terus belajar.³¹

Semua bentuk motivasi di atas dapat dikembangkan dan diarahkan oleh pendidik untuk dapat melahirkan hasil belajar yang lebih baik.

- b. Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus-menerus dalam waktu yang lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai).
- c. Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa). Tidak memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi sebaik mungkin (tidak cepat puas dengan prestasi yang dicapai).
- d. Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah “ untuk orang dewasa (misalnya masalah pembangunan agama, politik, ekonomi, keadilan,

³¹ Ibid h. 90

Dewasa ini, dikalangan tenaga-tenaga pendidikan, banyak dibicarakan/disinyalir terjadinya “ krisis motivasi belajar”, lebih-lebih di sekolah menengah/dikalangan remaja. Gejala tersebut ditunjukkan dengan kenyataan berkurangnya perhatian peserta didik pada waktu pelajaran, kelalaian dalam mengerjakan pekerjaan rumah, penundaan persiapan bagi ulangan atau ujian sampai saat terakhir (belajar musiman), pandangan asal lulus cukup, dan lain-lainnya. Dimana faktor-faktor penyebab krisis atau tenggelamnya motivasi tersebut antara lain adalah:

1. Kehidupan di luar lingkungan sekolah menawarkan banyak bentuk reaksi yang dapat membuat orang menjadi puas, meskipun puas itu tidak bertahan lama.
2. Pengaruh dari teman sebaya yang tidak menghargai prestasi tinggi dalam belajar di sekolah, sedangkan prestasi-prestasi di bidang lain (diluar sekolah) jauh lebih dihargai, seperti bertanding digelangga olah raga, mengebut di jalan raya, berpacaran dan sebagainya.
3. Kekaburan mengenai cita-cita hidup sesudah tamat pendidikan sekolah, terutama karena kemungkinan melanjutkan ke PT favorit nampak terbatas dan pengangguran sering berdiri di ambang pintu.
4. Keadaan keluarga yang kurang menguntungkan, karena sejak kecil anak kurang ditantang untuk memberi prestasi yang patut dibanggakan atas dasar

- Untuk mengatasi gejala krisis atau tenggelamnya motivasi belajar dikalangan itu, para ahli psikologi pendidikan, menghendaki diupayakannya terbentuknya” *achievemen motivation*”. Yang dimaksud dengan *achievemen motivation* adalah daya penggerak dalam diri peserta didik untuk mencapai taraf prestasi belajar setinggi mungkin, demi penghargaan pada diri sendiri. Ukuran mengenai taraf setinggi mungkin itu ditentukan oleh peserta didik sendiri. Kalau taraf prestasi itu tercapai, peserta didik merasa puas dan memberikan pujian kepada diri sendiri. Yang khas dalam motivasi yang demikian, bahwa hasrat untuk berprestasi dengan baik, itu bukan menurut dan pandangan orang lain, melainkan menurut ukuran dan pandangan sendiri. Dengan demikian *achievemen motivation* dalam rangka belajar di sekolah, menjadi/merupakan intensifikasi (peningkatan) dari bentuk motivasi intrinsic. Dalam hal ini, peserta didik menuntut tanggung jawab dari diri sendirimengenai taraf keberhasilan yang diperolehnya.³⁴

³⁴ Ibid.

a. Teori Hendonisme

Implikasi pada teori ini ialah adanya anggapan bahwa semua orang akan cenderung menghindari hal-hal yang sulit dan menyusahkan, atau yang mengandung resiko berat, dan lebih suka melakukan sesuatu yang mendatangkan kesenangan baginya. Peserta didik disuatu kelas merasa gembira dan bertepuk tangan mendengar pengumuman dari kepala sekolah bahwa guru matematika mereka tidak dapat mengajar karena sakit. Seorang pegawai segan bekerja dengan baik atau malas bekerja, tetapi selalu menuntut gaji dan upah yang selalu tinggi. Dan banyak lagi contoh yang lain, yangn menunjukkan bahwa motivasi itu sangat diperlukan. Menurut teori hedonism, para peserta didik dan pegawai tersebut pada contoh di atas harus diberi motivasi secara tepat agar tidak malas dan mau bekerja dengan baik, dengan memenuhi kesenangannya.

Teori berpandangan bahwa tindakan atau perilaku manusia tidak berdasarkan naluri-naluri, tetapi berdasarkan pola-pola tingkah laku yang dipelajari dari kebudayaan di tempat orang itu hidup. Orang belajar paling banyak dari lingkungan kebudayaan di tempat ai hidup dan dibesarkan. oleh karena itu, teori ini disebut juga *teori lingkungan kebudayaan*. Menurut teori ini apabila

c. Teori Daya Pendorong

d. Teori Kebutuhan

[illegible]

Banyak para ahli psikologi yang telah berjasa merumuskan kebutuhan-kebutuhan manusia ditinjau dari psikologi. Sejalan dengan itu pula maka terdapat adanya beberapa teori kebutuhan yang sangat erat berkaitan dengan kegiatan motivasi. Berikut ini dibicarakan salah satu dari teori kebutuhan yang dimaksud. Sebagai seorang pakar psikologi, Maslow mengemukakan adanya lima tingkatan kebutuhan pokok manusia. Kelima kebutuhan pokok manusia inilah yang kemudian dijadikan pengartian kunci dalam mempelajari motivasi manusia. Adapun lima kelima tingkatan kebutuhan pokok yang dimaksud dapat dilihat keterangan sebagai berikut:

1. *Kebutuhan fisiologis*, kebutuhan ini merupakan kebutuhan dasar, yang bersifat primer dan vital, yang menyangkut fungsi-fungsi biologis dasar dari organisme manusia seperti kebutuhan akan pangan, sandang dan papan.
2. *Kebutuhan rasa aman dan perlindungan (safety and security)* seperti terjamin keamanannya, terlindungi dari bahaya dan ancaman penyakit, perang, kemiskinan, kelaparan, perlakuan tidak adil.
3. *Kebutuhan sosial (social need)* yang meliputi antara lain kebutuhan akan dicintai, diperhitungkan sebagai pribadi, diakui sebagai anggota kelompok, rasa setia kawan, kerja sama.
4. *Kebutuhan akan penghargaan (esteem need)*, termasuk kebutuhan dihargai karena prestasi, kemampuan kedudukan, atau status, pangkat,

C. Hubungan Antara Hasil Ujian Nasional Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik

Demikian pula dengan hasil belajar akan optimal kalau ada motivasi yang tepat. Bergayut dengan ini maka kegagalan belajar peserta didik jangan begitu saja mempersalahkan pihak peserta didik, sebab mungkin saja guru tidak berhasil dalam memberi motivasi yang mampu membangkitkan semangat dan kegiatan peserta didik untuk belajar. Jadi tugas pendidik bagaimana mendorong para peserta didik agar pada dirinya tumbuh motivasi.³⁷

³⁵ Ngalim Purwanto, *psikologi pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1994), h. 78
³⁶ Sardiman, *Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 75
³⁷ Ibid, h. 77

pendidikan adalah kegiatan pengendalian, jaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggung jawaban penyelenggara pendidikan.

Dengan adanya peraturan pendidikan tentang sistem pendidikan yang digunakan untuk menilai, mengevaluasi tingkat belajar peserta didik dalam satuan pendidikan. Seorang pendidika diharapkan mampu memotivasi peserta didiknya dalam kegiatan belajar. Sebab seperti yang telah dijelaskan di atas motivasi pendidik sangatlah penting dalam kegiatan belajar mengajar karena berpengaruh dengan hasil akhir pembelajaran atau ujian nasional. Maka dari itu pendidik diharapkan mampu menciptakan suasana belajar yang nyaman, tenang dan menyenangkan agar peserta didik minat dalam pembelajar.

Jangan sampai karena adanya kebijakan ujian nasional yang tidak menentukan kelulusan peserta didik, lantas membuat semangat peserta didik kendur dalam motivasi belajar. Hal ini yang harus dihindari karena dengan peserta didik yang tidak lagi giat belajar atau kurangnya motivasi belajar tetap akan mempengaruhi nilai ujian nasional.

Tidak hanya itu nilai ujian nasional juga sebagai tolak ukur keberhasilan mutu pendidikan. Padaham pemerintah memberi kebijakan sesuai dengan masalah yang membelenggu dunia pendidikan. Misalnya dengan adanya kebijakan baru mempermudah peserta didik untuk mengukur kompetensi belajar, tanpa harus ada patokan yang wajib dari pemeritah.

Dengan diadakannya ujian nasional berbasis komputer selain memudahkan peserta didik untuk mengerjakan ujian nasional dan tidak ada lagi kecurangan, juga mendorong meningkatkan akuntabilitas penyelenggara ujian nasional. Menteri pendidikan dan kebudayaan bersama-sama dengan dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota mewujudkan penyelenggaraan ini sebagai solusi meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi anggaran³⁸.

³⁸ www.kemendikbud.go.id(selasa/17/11/2015)

Fungsi standarisasi pendidikan adalah untuk mengukur kualitas pendidika. Standar tersebut tentunya bukan merupakan ukuran yang statis yang tidak berubah, tetapi semakin lama semakin ditingkatkan. Kita bedakan antara standar ideal dan standar operasional tempora. Standar ideal dapat kita tentukan setiap 5 atau 10 tahun sedangkan standar operasional temporal dapat ditentukan setiap tahun. Standar ideal juga bertahap untuk dicapai seperti standar isi yaitu kurikulum sekolah perlu direvisi setiap sekurang-kurangnya 5-10 tahun. Standar nasional pendidikan adalah standar yang bergerak maju.⁴⁰

³⁹ H.A.R. Tilaar, *Standarisasi Pendidikan Nasional*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006), h. 105

[illegible]

Standar adalah patokan. Sewaktu-waktu tingkat pencapaian standar tersebut perlu diketahui sampai di mana efektivitasnya. Untuk pengetahuan itu diperlukan sarana-sarana seperti ujian atau evaluasi nasional. Ujian nasional atau evaluasi nasional tentunya tidak perlu meliputi seluruh standar isi, sebab tentunya hal tersebut meminta biaya dan tenaga yang luar biasa. Karena sifatnya sekadar untuk memberikan gambaran peta permasalahan pendidikan secara nasional, maka dipilih beberapa mata pelajaran yang esensial. Mata-mata pelajaran itu seperti bahasa Indonesia, matematika, dan ilmu pengetahuan alam, bahasa Inggris, sejarah nasional, geografi nasional. Di beberapa negara, evaluasi nasional tersebut tidak diwajibkan untuk semua daerah atau negara bagian tetapi secara sukarela diuji oleh daerah-daerah itu. sebab sebab maksudnya adalah memperoleh pemetaan masalah pendidikan maka evaluasi tersebut tentunya tidak dapat digunakan sebagai indikator kelulusan seseorang dalam program atau tingkatan pendidikan tertentu. Data yang diperoleh dari evaluasi nasional dianalisa dan dijadikan bahan untuk penyusunan strategi perbaikan.⁴²

⁴¹ Ibid

[illegible]

Dalam rangka otonomi daerah telah kita ketahui bahwa pendidikan dasar dan menengah merupakan wewenang pemerintah daerah. demikian pula wajib belajar yang sedang disusun di dalam suatu peraturan pemerintah menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah. wajib belajar 6 tahun yang mungkin kemudian dapat ditingkatkan menjadi wajib belajar 9 tahun dan 12 tahun tentunya akan mengubah wajah proses evaluasi. Sampai dengan evaluasi di tingkat pendidikan dasar dan pendidikan menengah, evaluasi tersebut menjadi tanggung jawab yang penuh dari guru. Inilah pulah yang merupakan tuntutan dari wajib belajar yang berkualitas.⁴⁴

⁴³ Ibid

[illegible]

D. Hipotesis Penelitian

Adapun hipotesa yang dilakukan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

Hipotesa kerja yang biasanya disebut hipotesis alternatif yang disingkat dengan H_a . Hipotesis ini dinyatakan ada hubungan antara Variable X dengan variable Y. Adapun hipotesa kerja (H_a) dalam penelitian ini adalah ada pengaruh implementasi PP 13/2015 tentang UN terhadap motivasi belajar peserta didik tahun pelajaran 2014-2015 di SMA Khadijah Surabaya.

[illegible]

2. Hipotesa Nol (H_0)

Hipotesa nol sering disebut hipotesis statistik yang disingkat dengan H_0 . Dalam hipotesis ini menyatakan bahwa tidak ada pengaruh implementasi PP 13/2015 tentang UN terhadap motivasi belajar peserta didik tahun pelajaran 2014-2015 di SMA Khadijah Surabaya.